

**PERANAN AKUNTANSI DALAM ANALISA  
PERHITUNGAN PAJAK  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
guna memperoleh Gelar sarjana Ekonomi

*Oleh :*

**LENI MARLINA WATI**

NIM : 0213 / FE / 98

NIRM : 98815531190500.28

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)**

2002

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : LENI MARLINA WATI  
Nomor Mahasiswa : 0213 / FE / 1998  
Nirm Mahasiswa : 98815531190500.28  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : PERANAN AKUNTANSI DALAM  
ANALISA PERHITUNGAN PAJAK  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi

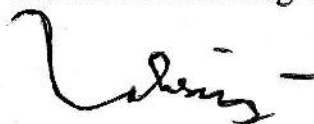


Dosen Pembimbing I



( Ummu Rosyidah, SE )

Dosen Pembimbing II



( A h s i n, SE )

## ABSTRAKSI

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan segala kegiatan pembangunan disegala bidang baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Sumber dananya adalah melalui sektor perpajakan. Dalam jangka panjang , peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan semakin besar. Agar sistem dalam perhitungan pajak lebih mudah di perlukan alat yang dipakai yaitu yang disebut dengan akuntansi yang dalam undang-undang perpajakan disebut juga dengan pembukuan. Penyelenggaraan pembukuan yang baik akan dapat menyajikan keterangan lengkap dan terinci mengenai semua transaksi-transaksi yang telah dilakukan .

Akuntansi sangat diperlukan disegala bidang usaha baik usaha yang bersekala menengah maupun besar. Namun yang berbeda antara prinsip akuntansi dan perpajakan adalah cara penyusunan laporan keuangannya. Laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan akan disebut juga dengan akuntansi pajak. Tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah agar dapat menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Bila pembukuan atau akuntansi diselenggarakan dengan benar dan memenuhi peraturan yang benar maka pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan akuntansi dalam analisa perhitungan pajak dan apakah sistem perhitungan pajak yang berlaku di Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menguraikan masalah secara luas

dan dan sistematis. Analisa data yang digunakan analisa data deskriptif kuantitatif yakni dengan menggunakan budget kas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menghitung pajak dengan menggunakan Cash Flow terlihat bahwa :

1. Adanya peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir ini. Misalkan pada pajak hiburan terjadi kenaikan yang pada tahun 1999 sebesar Rp 800.000, naik menjadi Rp 1.200.000 pada tahun 2000 dan Rp 1.400.000 pada tahun 2001. Begitu juga dengan pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak hotel dan resrauran. Namun pada pajak bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan terjadi penurunan, karena kurangnya minat pengusaha untuk melaksanakan usaha ini dan kurangnya kesadaran wajib pajak.
2. Terlihat pula peningkatan pada sektor retribusi dalam tiga tahun terakhir ini. Sebagian besar jenis retribusi mengalami peningkatan seperti retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi parkir dipinggir jalan umum, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi terminal. Namun pada retribusi penginapan mengalami penurunan sebesar Rp 120.000. penurunan ini disebabkan karena kurangnya tamu yang ingin menginap.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberi saran-saran agar pemerintah daerah lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran yang lebih tinggi untuk membayar pajak dan retribusi. Perlu dioptimalkannya keaktifan petugas pemungut dalam melakukan tugasnya serta pengawasan yang lebih baik terhadap obyek pajak dan retribusi yang ada. Dengan demikian tidak akan terjadi penunggakan terhadap pajak dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat, sehingga sumber-sumber dana peningkatan pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan.